



Transformasi Perilaku Politik Kader Partai: Studi Kasus Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan Anggota Partai Golkar Kota Padang di Dalam Pemerintahan

Anggiara Dipta¹, Afrialdi Cahya Pratama^{2*}, Fahdila Rahmi Aprilita³, Annafi Ilham⁴, Dara Rizki Fadila⁵, Agan Rahmat hulu⁶, Lano Alvin Zalukhu⁷, Syamsir⁸

Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4121>

*Correspondence: Afrialdi Cahya Pratama

Email: afr2605@gmail.com

Received: 07-03-2026

Accepted: 18-04-2026

Published: 25-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study examines the transformation of political behavior among Golkar Party cadres in Padang City, focusing on leadership dynamics and decision-making patterns after entering government structures. Using a qualitative case study design, data were gathered through in-depth interviews with the Secretary of the Padang City Golkar Party DPD (2025–2030), who is also a former Ministry of Finance ASN of two decades. The analysis applied thematic coding based on Weber's legitimacy, Katz-Mair's cartel party, Simon's bounded rationality, Lindblom's incrementalism, and Michels' Iron Law of Oligarchy, reinforced by a narrative literature review of 22 academic journals (2010–2026). Findings indicate that political behavior transformation is non-linear, resulting from complex interactions between structural shifts, resource access, and elite normative pressures. The leadership displayed is transformational-normative, shifting cadres from limited bureaucratic roles to expansive mediators of public aspirations. Decision-making follows collective deliberation reflecting Lindblom's incrementalist model. This research confirms that party involvement is not merely interest co-optation, but potentially expands action spaces for public service-oriented cadres.*

Keywords: *Political Behavior Transformation, Party Leadership, Decision Making, Golkar Party, Local Government, Narrative Literature Review.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji transformasi perilaku politik kader Partai Golkar Kota Padang, berfokus pada dinamika kepemimpinan dan pola pengambilan keputusan setelah memasuki struktur pemerintahan. Menggunakan desain studi kasus kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang 2025–2030 (mantan ASN Kementerian Keuangan dua dekade). Analisis menggunakan coding tematik berbasis teori legitimasi Weber, *cartel party* Katz-Mair, *bounded rationality* Simon, inkrementalisme Lindblom, dan Hukum Besi Oligarki Michels, serta diperkuat *narrative literature review* terhadap 22 jurnal akademik (2010–2026). Temuan menunjukkan transformasi perilaku politik tidak linear, melainkan hasil interaksi pergeseran struktural, akses sumber daya, dan tekanan normatif elite. Kepemimpinan yang ditampilkan bersifat transformasional-normatif, mengubah peran birokrat yang terbatas menjadi mediator aspirasi publik yang ekspansif. Pengambilan keputusan partai mengikuti pola deliberasi kolektif yang mencerminkan model inkrementalisme. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan dalam partai politik tidak selalu berupa kooptasi kepentingan, melainkan berpotensi membuka ruang bertindak lebih luas bagi kader berorientasi pelayanan publik.

Kata kunci: Transformasi Perilaku Politik, Kepemimpinan Partai, Pengambilan Keputusan, Partai Golkar, Pemerintahan Lokal, Narrative Literature Review

Pendahuluan

Bagaimana seseorang berubah ketika memperoleh kekuasaan politik? Pertanyaan ini sudah lama menghantui ilmu politik, dan di Indonesia pasca-reformasi ia terasa semakin mendesak. Partai politik bukan lagi sekadar mesin pemilu. Ia telah berubah menjadi

institusi yang secara aktif membentuk orientasi, nilai, dan kapasitas kader jauh setelah mereka menduduki jabatan publik. Di sinilah ketegangan yang sesungguhnya: apakah masuk ke partai mendorong seseorang untuk lebih melayani masyarakat, atau justru menariknya ke dalam arus kepentingan organisasi yang sempit?

Partai Golkar di Kota Padang menawarkan kasus yang tepat untuk menguji pertanyaan itu. Sebagai salah satu partai dengan struktur organisasi paling mapan di Indonesia, Golkar memiliki mekanisme kaderisasi yang sistematis, hierarki internal yang jelas, dan akses terhadap sumber daya negara melalui anggota legislatif di berbagai level pemerintahan. Kota Padang sendiri, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, adalah arena politik lokal yang kompetitif sehingga perilaku kader Golkar di sini mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam hubungan antara partai dan pemerintahan daerah.

Beberapa kerangka teori besar relevan untuk membaca fenomena ini. Maurice [Duverger](#) (1954) berpendapat bahwa struktur internal partai menentukan pola kepemimpinan dan disiplin kader. [Robert Michels \(1911\)](#), melalui konsep *Iron Law of Oligarchy*, menekankan kecenderungan organisasi besar untuk dikendalikan oleh elite tertentu. [Katz dan Mair \(1995\)](#) mengamati bahwa partai modern semakin bergantung pada sumber daya negara untuk mempertahankan eksistensinya. Ketiga perspektif ini membentuk peta konseptual yang berguna untuk memahami apa yang terjadi ketika seorang kader yang sebelumnya birokrat senior berpindah ke ranah politik dan mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi partai.

Berbagai perspektif teoritis tersebut menunjukkan bahwa transformasi perilaku politik tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan individu semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur partai, relasi kekuasaan, dan dinamika organisasi politik. Namun demikian, bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam konteks penelitian empiris di Indonesia masih menunjukkan variasi fokus kajian. Oleh karena itu, penting untuk meninjau penelitian-penelitian terdahulu guna untuk melihat kecenderungan tema, pendekatan, serta celah penelitian yang masih terbuka.

Sayangnya, penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia umumnya menempatkan partai politik sebagai institusi yang diteliti secara kelembagaan: struktur, koalisi, strategi elektoral ([Asnan, 2024](#); [Budiatri et al., 2018](#)). Dimensi perubahan perilaku individu kader, terutama setelah mereka memasuki struktur kekuasaan formal, jarang mendapat perhatian serius. Padahal, justru di titik transisi inilah kualitas demokrasi lokal sesungguhnya diuji bukan pada slogan kampanye, melainkan pada bagaimana kader merumuskan prioritas, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam transformasi perilaku politik seorang kader Partai Golkar Kota Padang dengan latar belakang yang tidak biasa: dua dekade sebagai ASN di Kementerian Keuangan sebelum akhirnya bergabung dengan partai dan dipercaya sebagai Sekretaris DPD periode 2025–2030. Analisis diperkuat melalui *narrative literature review* terhadap 22 jurnal akademik (2010–2026) yang berfungsi sebagai pembanding sekaligus penguat temuan kualitatif.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi penelitian ini dalam kajian akademik sebelumnya, penelitian ini juga dilengkapi dengan *narrative literature review* terhadap 22 jurnal akademik yang relevan. *Literature review* ini

digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan penelitian terdahulu, memperkuat analisis empiris, serta menemukan research gap yang menjadi dasar penting penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait Transformasi Perilaku Politik, Oligarki, dan Kaderisasi Partai

No	Penulis (Tahun)	Judul	Tujuan	Metode	Hasil/Temuan
1	Solihah, Kartini, & Herdiansah (2022)	<i>Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Indonesia Masa Reformasi</i>	Mensosialisasikan model rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang ideal	Deskriptif kualitatif; KKN Integratif Virtual	Kaderisasi ideal memerlukan seleksi terbuka, pendidikan ideologis, dan pembentukan karakter publik
2	Adhianugrah & Djumadin (2023)	<i>Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik</i>	Mendeskripsikan keterlibatan oligarki elit partai dalam seleksi kandidat Pilkada	Kualitatif deskriptif; wawancara dan dokumentasi	Elit partai mendominasi proses kandidasi dan memperkuat oligarki lokal
3	Asnan (2024)	<i>Analysis of Elite Contestation and Political Base of the GOLKAR Party during the 2014–2016 Joko Widodo Administration</i>	Menganalisis kontestasi elite dan basis politik Golkar	Kualitatif; studi pustaka dan dokumen	Golkar mengalami fragmentasi elite tetapi tetap menjaga basis kader daerah
4	Koho (2021)	<i>Oligarki dalam Demokrasi Indonesia</i>	Mengkaji praktik oligarki dalam demokrasi Indonesia	Studi literatur dan analisis normatif	Oligarki memperlemah partisipasi masyarakat dan demokrasi lokal
5	Nge (2018)	<i>Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah</i>	Mendeskripsikan pola oligarki dalam rekrutmen kepala daerah	Kualitatif; studi kasus	Rekrutmen kandidat dikuasai elit dan modal politik tertentu
6	Suryani dkk. (2021)	<i>Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Civil Society</i>	Menganalisis penguatan oligarki dalam tata kelola SDA	Kualitatif; analisis kebijakan	Oligarki memperkuat dominasi melalui legislasi dan melemahkan civil society
7	Syawawi (2021)	<i>Memutus Oligarki dan Klientelisme dalam Sistem Politik Indonesia melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik oleh Negara</i>	Merumuskan model pendanaan partai berbasis negara	Yuridis normatif	Pendanaan negara dapat mengurangi ketergantungan partai pada oligarki

8	Jhon Retei Alfri (2025)	<i>Pokok Pemikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Akomodasi dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah</i>	Menganalisis mekanisme Pokir DPRD dalam RKPD	Kualitatif; studi kasus	Pokir menjadi arena politik anggaran antara legislatif dan eksekutif
9	Fahigo Azpriwidio Pernanda, Zetra, & Anggraini (2025)	<i>Analisis Pengelolaan Anggaran Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Padang Osman Ayub Tahun 2020–2024</i>	Mendeskripsikan pengelolaan Pokir DPRD Kota Padang	Kualitatif; studi kasus	Pokir meningkatkan elektabilitas anggota DPRD melalui distribusi program
10	Gunanto (2020)	<i>Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia</i>	Mengkritisi praktik politik dinasti di Indonesia	Studi literatur dan normatif	Politik dinasti mempersempit rekrutmen kader berkualitas
11	Hasibuan & Ma'riyah (2023)	<i>Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan dalam Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah 2020</i>	Mendeskripsikan pendidikan politik PDIP	Kualitatif; wawancara dan dokumen	Sekolah partai meningkatkan kesiapan kader dalam kontestasi politik
12	Elyta , Hertanto, & Maryanah (2022)	<i>Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi</i>	Menganalisis pola korupsi elite partai	Kualitatif; analisis kasus	Lemahnya kaderisasi dan dominasi kepentingan finansial memicu korupsi
13	Arianto (2021)	<i>Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020</i>	Menganalisis dampak politik kekerabatan dalam pilkada	Kuantitatif-deskriptif	Politik kekerabatan memengaruhi banyak pencalonan kepala daerah
14	Wibowo , Imanullah, Sainika, & Isfany (2024)	<i>Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia</i>	Merumuskan kerangka hukum pembatasan oligarki	Yuridis normatif	Reformasi UU Parpol dan Pemilu diperlukan untuk membatasi dominasi kapital
15	Martini (2010)	<i>Politisasi Birokrasi di Indonesia</i>	Menganalisis fenomena politisasi birokrasi	Studi literatur dan analisis kebijakan	Politisasi birokrasi merusak netralitas dan profesionalisme ASN
16	Yusri & Mahuli (2023)	<i>Dampak Negara Dikendalikan Partai Politik dan Oligarki</i>	Mendeskripsikan dampak <i>state capture</i> oleh oligarki	Studi literatur dan kasus kebijakan	Oligarki menurunkan akuntabilitas publik dan mendistorsi kebijakan
17	Siagian & Permatasari (2022)	<i>Insecurisme Politik Rakyat Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah 2020</i>	Menganalisis dampak ketidakamanan politik rakyat	Deskriptif kualitatif	Ketidakpercayaan pada partai memicu perilaku pemilih pragmatis

18	Kurniawan, Sulaksono, Mentari, Marsela, & Safitri (2025)	<i>Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Pembinaan Generasi Muda: Studi Kasus AMPG Provinsi Lampung</i>	Mendeskripsikan pembinaan kader pemuda oleh AMPG	Deskriptif kualitatif	AMPG membentuk kader kompetitif melalui pendidikan politik bertahap
19	Nur Habibah dkk. (2025)	<i>Perbandingan Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019 dan 2024</i>	Membandingkan efektivitas pendidikan politik Golkar	Komparatif kualitatif	Pendidikan politik digital meningkatkan suara Golkar pada 2024
20	Nugraha (2026)	<i>Analisis Strategi Kepemimpinan Politik dalam Membangun Loyalitas dan Kapasitas Kader</i>	Menganalisis kepemimpinan transformasional dalam partai politik	Kualitatif; studi kasus	Kepemimpinan transformasional meningkatkan loyalitas kader
21	Dahlia & Permana (2022)	<i>Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024</i>	Mendeskripsikan peran oligarki media dalam pemilu	Kualitatif; analisis media	Media digunakan untuk kepentingan politik kandidat tertentu
22	Gustomy (2020)	<i>Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter</i>	Menganalisis polarisasi politik dalam wacana Covid-19	Analisis konten kualitatif-kuantitatif	Twitter menjadi arena polarisasi politik berbasis identitas partisan

Dua puluh dua artikel tersebut dipilih berdasarkan empat kriteria: relevansi tematik dengan isu transformasi perilaku kader, oligarki, kaderisasi, kepemimpinan politik, dan dinamika pengambilan keputusan; kebaruan kajian pada rentang 2010–2026 yang merepresentasikan dinamika kontemporer sistem kepartaian Indonesia; keberagaman metodologi mulai dari kualitatif, kuantitatif, yuridis normatif, studi kasus, hingga analisis kebijakan; serta keterlacakan ilmiah melalui publikasi jurnal.

Berdasarkan hasil pemetaan pada tabel 1, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan tema yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fokus utama. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah identifikasi pola kajian, keterkaitan antar penelitian, serta posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya. Secara umum, literatur yang di analisis terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kajian mengenai oligarki dan kaderisasi partai, transformasi kader dan dinamika kepemimpinan politik, serta konteks makro hubungan partai, birokrasi dan demokrasi kontemporer.

Kelompok pertama literatur (No. 1–7) memperkuat argumentasi mengenai kaderisasi, oligarki, dan dinamika internal partai. [Solihah, Kartini, dan Herdiansah \(2022\)](#)

menegaskan bahwa kaderisasi yang baik membutuhkan rekrutmen terbuka, pendidikan ideologis, dan pembentukan karakter publik. [Adhianugrah dan Djumadin \(2023\)](#), [Koho \(2021\)](#), serta [Nge \(2018\)](#) memperlihatkan bagaimana oligarki elit partai masih mendominasi proses kandidasi di tingkat lokal. [Suryani dkk. \(2021\)](#) dan [Syawawi \(2021\)](#) memperluas gambaran itu dengan menunjukkan bahwa oligarki juga bekerja melalui penguasaan sumber daya politik dan pendanaan partai.

Kelompok kedua (No. 8–14) memberikan perbandingan empiris dan kritis terhadap proses transformasi kader. Jhon Retei [Alfri \(2025\)](#) serta Fahigo Azpriwidio [Pernanda dkk. \(2025\)](#) menyediakan konteks empiris mengenai Pokir DPRD sebagai arena politik anggaran antara legislatif dan eksekutif daerah. [Elyta, Hertanto, dan Maryanah \(2022\)](#) mencatat bahwa lemahnya kaderisasi dan dominasi kepentingan finansial berkontribusi langsung pada korupsi elite partai. [Hasibuan dan Ma'riyah \(2023\)](#) memperlihatkan bahwa sekolah partai mampu meningkatkan kesiapan kader secara nyata. [Arianto \(2021\)](#) dan [Gunanto \(2020\)](#) melengkapi analisis dengan menunjukkan bahwa politik kekerabatan dan dinasti masih membatasi sirkulasi kader berkualitas dalam demokrasi lokal.

Kelompok ketiga (No. 15–22) memberikan konteks makro. [Martini \(2010\)](#) menjelaskan bagaimana politisasi birokrasi menciptakan kedekatan antara birokrat dan kekuatan politik praktis. [Yusri dan Mahuli \(2023\)](#) menyoroiti *state capture* oleh oligarki yang mendistorsi kebijakan publik. [Siagian dan Permatasari \(2022\)](#) mencatat rendahnya kepercayaan publik terhadap partai yang melahirkan pemilih pragmatis. [Kurniawan dkk. \(2025\)](#) dan [Nur Habibah dkk. \(2025\)](#) secara spesifik memotret pola kaderisasi Golkar dan dampaknya pada elektabilitas, sementara [Nugraha \(2026\)](#) menambahkan perspektif kepemimpinan transformasional sebagai faktor pembentuk loyalitas dan kapasitas kader. [Dahlia dan Permana \(2022\)](#) serta [Gustomy \(2020\)](#) melengkapi gambaran dengan menunjukkan bahwa media dan ruang digital turut membentuk dinamika perilaku politik dan polarisasi dalam demokrasi kontemporer.

Maka, Berdasarkan pemetaan terhadap dua puluh dua artikel tersebut, terdapat beberapa celah penelitian (research gap) yang diisi oleh penelitian ini. Pertama, mayoritas penelitian sebelumnya menempatkan partai politik atau sistem kepartaian sebagai unit analisis utama, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada transformasi perilaku kader secara individual, khususnya kader yang memiliki pengalaman lintas peran antara birokrasi dan politik praktis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif mikro mengenai bagaimana pengalaman birokrasi memengaruhi pola kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan perilaku politik kader partai. Kedua, studi mengenai Pokir DPRD seperti yang dilakukan oleh Jhon Retei [Alfri \(2025\)](#) dan Fahigo Azpriwidio [Pernanda dkk. \(2025\)](#) masih berfokus pada aspek tata kelola anggaran dan implikasi elektoral. Penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan mengaitkan mekanisme Pokir dengan dinamika kepemimpinan politik, relasi kekuasaan internal partai, serta transformasi perilaku kader dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, penelitian mengenai kaderisasi dan kepemimpinan transformasional dalam partai politik seperti [Nugraha \(2026\)](#), [Hasibuan dan Ma'riyah \(2023\)](#), serta [Nur Habibah dkk. \(2025\)](#) umumnya menyoroiti dimensi kelembagaan partai dan efektivitas program pendidikan politik. Penelitian ini menawarkan novelty dengan mengkaji bagaimana latar belakang birokrasi sebelumnya membentuk gaya kepemimpinan, orientasi pelayanan, dan pola interaksi

kader setelah memasuki arena politik praktis. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang menghubungkan kajian oligarki, kaderisasi partai, kepemimpinan politik, dan transformasi perilaku individu kader dalam konteks politik lokal Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Sebagaimana dijelaskan [Creswell](#), pendekatan kualitatif dipilih ketika peneliti ingin mengeksplorasi makna yang berasal dari pengalaman subjek dalam konteks sosial yang spesifik ([Creswell](#), 2014). Desain studi kasus tepat digunakan ketika fenomena yang diteliti tidak dapat dipisahkan dari konteksnya dan batas antara keduanya tidak terlihat jelas ([Yin](#), 2014). Dalam penelitian ini, transformasi perilaku kader tidak dapat dipahami tanpa memahami konteks spesifik Partai Golkar Kota Padang beserta dinamika politik lokalnya.

Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan satu informan kunci yang dipilih secara purposive. Teknik purposive sampling dipilih karena penelitian kualitatif mengutamakan kedalaman informasi daripada representasi statistik ([Patton](#), 2002). Informan kunci yang dipilih adalah Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang periode 2025–2030, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) selama lima tahun, dan sebelum bergabung dengan partai, mengabdikan sebagai ASN di Kementerian Keuangan selama dua puluh tahun.

Wawancara berlangsung semi-terstruktur, mengikuti panduan yang dikembangkan dari pertanyaan penelitian namun tetap fleksibel untuk mengikuti alur narasi informan. Durasi wawancara sekitar satu jam, dengan transkrip penuh yang kemudian dianalisis secara tematik.

Analisis data mengikuti tiga tahap utama yang direkomendasikan Miles, Huberman, dan Saldaña: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, transkrip wawancara dikoding secara tematik dengan mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Pada tahap ini dihasilkan sepuluh kode utama yang dikelompokkan ke dalam empat kategori: kepemimpinan politik, pengambilan keputusan, perilaku politik, dan relasi kepentingan partai-publik.

Pada tahap penyajian, data disusun dalam matriks analitis yang menghubungkan kode, kutipan kunci, dan interpretasi teoritis. Tahap ketiga, penarikan kesimpulan, dilakukan dengan mengaitkan pola temuan dengan kerangka teoritis yang dikembangkan dalam tinjauan pustaka dan narrative literature review.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data wawancara dengan observasi lapangan dan dokumentasi partai), triangulasi teori (menginterpretasikan temuan melalui beberapa kerangka teoritis yang berbeda), serta triangulasi Data (memverifikasi temuan dengan 22 jurnal dalam narrative literature review) ([Neuman](#), 2007).

Hasil dan Pembahasan

Profil Transformasi: Dari Birokrat ke Politisi

Perjalanan informan dari ASN Kementerian Keuangan ke Sekretaris DPD Golkar Kota Padang memberikan gambaran spesifik mengenai bagaimana transformasi identitas politik dapat terjadi di level individu. Pengalaman dua dekade dalam birokrasi keuangan

dipersepsikan oleh informan sebagai keterbatasan kapasitas. Informan mengaku bahwa kapasitas bertindak untuk masyarakat sangat terbatas: “Dulu waktu ASN, saya cuma bisa bantu orang sedikit karena kekuatan finansial pribadi (wawancara informan kunci, 2026).” Keterbatasan itu bersumber dari tiga hal yang saling terkait: batasan regulasi ASN, keterbatasan waktu karena jadwal kerja birokrasi, dan tidak adanya akses terhadap sumber daya kolektif yang lebih besar.

Temuan ini sejalan dengan [Martini \(2010\)](#) yang menunjukkan bahwa politisasi birokrasi di Indonesia menciptakan situasi di mana birokrat yang ingin berdampak lebih luas seringkali terdorong untuk beralih ke ranah partai politik. Pada saat bersamaan, [Solihah et al. \(2022\)](#) menegaskan bahwa kualitas transisi dari birokrat ke politisi sangat bergantung pada ketersediaan mekanisme kaderisasi yang sistematis kondisi yang dalam pengalaman informan tampaknya dipenuhi oleh Golkar Kota Padang melalui jalur Bappilu yang dilalui informan selama lima tahun sebelum menjadi Sekretaris.

Keputusan untuk bergabung dengan Golkar setelah mengundurkan diri dari posisi ASN dinilai oleh informan bukan keputusan impulsif. Informan menyebutnya sebagai respons terhadap rasa frustrasi yang terakumulasi; sebuah kebutuhan untuk menemukan ruang bertindak yang lebih luas. transformasi perilaku politik sering kali dimulai dari ketidakpuasan terhadap kapasitas bertindak dalam posisi yang ada ([Budiatri et al., 2018](#)). Dalam Perspektif informan, partai bukan hanya dipandang sebagai kendaraan kekuasaan, tetapi juga solusi atas keterbatasan struktural yang dirasakan selama bertahun-tahun sebagai birokrat.

Yang menarik secara analitis adalah bahwa transformasi ini tidak menghapus warisan birokrasi, melainkan menggabungkannya dengan logika politik. Pengalaman dua dekade di Kementerian Keuangan membentuk orientasi terhadap tata kelola anggaran yang kemudian menjadi aset dalam memahami mekanisme Pokir dan distribusi anggaran daerah. Temuan ini dapat dibaca sebagai bentuk dari role adaptation yaitu adaptasi peran yang tidak memutus identitas lama, tetapi mengintegrasikannya ke dalam konteks baru.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Perilaku Politik Kader Sebelum dan Sesudah Masuk Partai

Dimensi	Sebelum Masuk Partai (ASN)	Setelah Jadi Kader Partai	Implikasi Teoritik	Evidensi dari Literature Review	Keterangan
Sumber Kekuasaan	Kewenangan birokrasi; terbatas aturan formal negara	Legitimasi formal partai (SK) + dukungan hierarki organisasi	Weber: legitimasi rasional-legal (2013)	Martini (2010) : politisasi menunjukkan kekuasaan birokrat tergantung konteks politik	Pergeseran dari kewenangan jabatan ke kewenangan relasional
Kapasitas Bertindak	Terbatas: waktu, anggaran, dan regulasi ASN	Meningkat drastis: akses Pokir, jaringan legislatif multi-level	Budiatri et al. (2018) : transformasi peran struktural	Alfri (2025) ; Pernanda et al. (2025) : Pokir sebagai instrumen kapasitas bertindak konkret	Pokir memperluas jangkauan aksi kader secara kuantitatif

Orientasi Kepentingan	Netral birokratis; implementasi kebijakan dari atas	Dual track: kepentingan partai + aspirasi konstituen	Katz & Mair (1995); cartel party dynamics	Elyta et al. (2022); risiko deviasi ketika kepentingan partai mendominasi orientasi kader	Ketegangan inheren antara dua orientasi ini harus dikelola secara normatif
Gaya Kepemimpinan	Transaksional; prosedural; hierarkis-administratif	Transformasional-normatif; motivasi moral; visi kolektif partai	Bass & Burns: transformasional leadership (1978)	Nugraha (2026); kepemimpinan transformasional di parpol daerah terbukti membangun loyalitas kader	Pola kepemimpinan transformasional mendominasi dengan unsur transaksional laten
Mekanisme Keputusan	Individual/unit kerja; berbasis SOP dan regulasi	Kolektif: Rapat Pleno + Rapat Harian; melibatkan fraksi DPRD	Lindblom: incrementalism & kompromi (1959)	John (2025): negosiasi Pokir dalam penyusunan APBD mencerminkan model inkrementalisme	Deliberasi kolektif mencegah sentralisasi keputusan pada satu aktor
Akuntabilitas	Vertikal ke atas birokrasi; berbasis kinerja administratif	Karitatif-langsung: program bedah rumah, seragam, beasiswa	Almond & Verba (1963): budaya politik partisipan	Pernanda et al. (2025); Pokir karitatif meningkatkan elektabilitas; Siagian dan Permatasari (2022); insecurisme pemilih mensyaratkan bukti nyata	Risiko: akuntabilitas karitatif tanpa prosedural menciptakan klientelisme
Tekanan yang Dirasakan	Tekanan koersif: disiplin ASN, sanksi administratif	Tekanan normatif: "berbuat baik kepada masyarakat"	Michels; moral suasion elite partai (1911)	Nugraha (2026); Habibah et al. (2025); tekanan normatif lebih efektif membangun loyalitas daripada sanksi koersif	Internalisasi nilai partai menggantikan koersi sebagai mekanisme kendali perilaku

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Hasil wawancara dan literature review

Legitimasi dan Sumber Kekuasaan Kepemimpinan

Salah satu temuan yang paling mencolok dalam wawancara adalah cara informan mendefinisikan legitimasi kepemimpinannya. Ketika ditanya tentang sumber kekuatan dalam jabatan barunya, respons pertamanya adalah: 'Saya jadi Sekretaris baru beberapa hari ini, SK-nya baru keluar... untuk menjawab pertanyaan harus ada legitimasi juga dari Ketua.' Pernyataan ini sangat kaya secara teoritis karena mengungkap dua hal sekaligus: pertama, bahwa legitimasi dipahami secara rasional-legal dalam kerangka Weber kekuasaan bersandar pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh struktur formal partai;

kedua, bahwa legitimasi itu tidak mandiri melainkan bersifat relasional membutuhkan pengakuan dari hierarki yang lebih tinggi.

Temuan ini diperkuat oleh [Nugraha \(2026\)](#) yang menemukan pola serupa di parpol Provinsi Riau: legitimasi kepemimpinan kader tidak cukup bersumber dari jabatan formal, tetapi memerlukan endorsement relasional dari pemimpin di atasnya. Ini berbeda dari model birokrasi Weberian murni di mana kewenangan melekat pada jabatan fungsional. Dalam kasus yang diteliti, tampaknya ada indikasi awal bahwa legitimasi bersifat lebih cair dan kontekstual bergantung pada kepercayaan elite, dukungan jaringan, dan rekam jejak perilaku kader di masa lalu ([Budiatri et al., 2018](#)).

Yang menarik, sumber kekuatan kedua yang disebutkan informan justru bersifat lebih pragmatis: akses terhadap jaringan legislatif multi-level. Dengan memiliki anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota sebagai bagian dari ekosistem partai. dalam perspektif informan, seorang kader Golkar memiliki saluran yang konkret untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi alokasi anggaran. [Katz dan Mair \(1995\)](#) menyebut fenomena ini sebagai karakteristik cartel party: partai menggunakan posisinya dalam negara untuk memperkuat legitimasi politiknya sekaligus mendistribusikan manfaat kepada basis konstituen. Konteks Kota Padang mengindikasikan mekanisme ini melalui instrumen Pokir yang dianalisis secara mendalam oleh Jhon Retei [Alfri \(2025\)](#) dan [Pernanda et al \(2025\)](#).

Gaya Kepemimpinan: Indikasi Pola Transformasional-Normatif

Analisis terhadap narasi informan mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan yang dirasakan dalam pengalaman organisasi informan dalam konteks Golkar Kota Padang cenderung mengarah ke model transformasional dibandingkan transaksional. Indikator paling kuat adalah cara tekanan dari elite partai didefinisikan. Ketika ditanya tentang tekanan yang dirasakan sebagai Sekretaris, informan menjawab: 'Tekanan dari Ketua kami adalah: setiap kader harus berbuat baik kepada masyarakat, bantu tetanggamu, dan jaga marwah partai.' Tekanan ini bukan bersifat koersif atau berbasis sanksi, melainkan bersifat normatif mendorong internalisasi nilai tanpa ancaman hukuman.

Temuan ini selaras dengan [Nugraha \(2026\)](#) yang mendokumentasikan pola kepemimpinan transformasional dalam konteks parpol Riau: para ketua partai yang menerapkan dimensi idealized influence dan inspirational motivation (Bass, 1985) terbukti mampu membangun loyalitas kader yang lebih tahan lama dibandingkan kepemimpinan berbasis reward-punishment. [Habibah et al. \(2025\)](#) menambahkan bahwa pendidikan politik Golkar yang menekankan nilai 'Dari Rakyat untuk Rakyat' menciptakan efek sosialisasi yang memperkuat orientasi pelayanan publik kader, sejalan dengan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Namun demikian, unsur transaksional tidak sepenuhnya absen. Ketika informan berbicara tentang program bedah rumah, seragam gratis, dan beasiswa sebagai bentuk akuntabilitas publik, ada dimensi pertukaran yang implisit: partai memberikan manfaat konkret kepada masyarakat yang dalam beberapa kasus masyarakat dapat memberikan dukungan politik kepada partai. [Pernanda et al \(2025\)](#) dalam penelitiannya

mengindikasikan mekanisme ini dalam konteks Kota Padang: anggota DPRD Kota Padang yang mengelola Pokir secara efektif mengalami kenaikan suara yang signifikan di Pemilu 2024. Ini adalah bentuk indikasi awal rasionalitas transaksional yang bekerja di bawah permukaan retorika transformasional suatu fenomena yang konsisten dengan peringatan [Michels \(1911\)](#) bahwa retorika altruistik sering menjadi mantel bagi kalkulasi kekuasaan yang lebih pragmatis.

Tabel 2. Tipologi Gaya Kepemimpinan: Transformasional vs Transaksional dalam Konteks Golkar Kota Padang

Dimensi	Transformasional	Transaksional	Temuan Lapangan
Motivasi Kader	Visi moral & nilai kolektif	Pertukaran kepentingan & insentif	Tekanan normatif: "berbuat baik kepada masyarakat"
Sumber Pengaruh	Karisma + legitimasi ideologis	Jabatan formal + reward/punishment	SK formal + doktrin "Dari Rakyat untuk Rakyat"
Orientasi Kebijakan	Kepentingan jangka panjang & publik	Pertukaran dukungan jangka pendek	Program Pokir untuk pendidikan, kesehatan, bencana
Hub. Pemimpin-Kader	Inspiratif; membangun kapasitas	Kontrak; taat arahan demi insentif	Penanaman nilai; loyalitas moral bukan koersif
Dominansi dalam Kasus	Dominan	Hadir tapi minor	Kepemimpinan transformasional mendominasi

Sumber: Adaptasi dari Bass & Burns (1978), dan wawancara, 2026

Mekanisme Pengambilan Keputusan Kolektif

Dalam hal pengambilan keputusan, narasi informan menggambarkan sistem yang lebih terstruktur dari yang mungkin dibayangkan dari luar. Berdasarkan pengalaman Informan, pengambilan keputusan di DPD Partai Golkar Kota Padang menjalankan dua mekanisme rapat utama: Rapat Harian untuk pembahasan isu-isu operasional sehari-hari, dan Rapat Pleno untuk pengambilan keputusan strategis yang melibatkan seluruh pengurus harian beserta anggota DPRD aktif. Keterlibatan anggota DPRD dalam rapat pleno sebagaimana yang dijelaskan oleh informan mengindikasikan adanya hubungan yang cukup erat antara struktur partai dan fungsi pemerintahan.

Informan mendeskripsikan dinamika rapat dengan jujur: 'Tetap ada pro dan kontra dalam rapat, itu biasa. Tapi hasil keputusannya tetap untuk bagaimana Partai Golkar Kota Padang bisa berbuat banyak bagi masyarakat.' Temuan ini Memiliki kesesuaian dengan model inkrementalisme Lindblom (1959). Keputusan tidak lahir dari kalkulasi optimal yang komprehensif, melainkan dari proses negosiasi bertahap yang mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa mencapai konsensus sempurna. mekanisme serupa dalam proses penetapan Pokir DPRD: tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif menghasilkan kompromi yang secara kolektif mencerminkan aspirasi konstituen, meskipun tidak optimal dari perspektif mana pun ([Alfri, 2025](#)).

Satu hal yang perlu dicatat kritis adalah potensi Iron Law of Oligarchy yang bekerja di sini. Meskipun rapat pleno melibatkan 'seluruh pengurus harian,' informasi strategis dan

pengaruh sesungguhnya mungkin terkonsentrasi pada kelompok kecil. [Adhianugrah & Djumadin \(2023\)](#) menemukan pola serupa di Pilkada Kota Medan 2020: struktur rapat formal parpol tidak menghalangi elite kecil untuk mendominasi agenda dan keputusan substansial. [Nge \(2018\)](#) dan [Koho \(2021\)](#) Menunjukkan bahwa dalam banyak kasus parpol, mekanisme deliberatif formal tidak selalu menghilangkan dominasi elit.



Gambar 1. Alur Pengambilan Keputusan Politik di DPD Partai Golkar Kota Padang
Sumber: Rekonstruksi hasil dari wawancara dengan informan (2026)

Faktor-Faktor Transformasi Perilaku Politik

Berdasarkan analisis tematik terhadap Hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan pengalaman informan yang diperkuat dengan narrative literature review, penelitian ini mengidentifikasi sedikitnya enam faktor yang dalam konteks kasus ini berkontribusi terhadap transformasi perilaku politik. Pertama, pergeseran posisi struktural dari birokrat menjadi politisi mengindikasikan bahwa pergeseran ini membawa pengaruh perubahan mendasar dalam hak, kewajiban, dan kapasitas bertindak politiknya. Dalam birokrasi, kewenangan bersifat terikat pada regulasi yang berlapis; dalam partai, ada ruang yang lebih longgar untuk inisiatif dan kreativitas politik, asalkan tetap dalam kerangka kepentingan partai. pergeseran ini bukan hanya fungsional tetapi juga identitasional birokrat yang bertransisi ke politik mengalami perubahan cara memandang diri dan [perannya \(Martini, 2010\)](#).

Kedua, akses terhadap sumber daya kolektif terutama Pokir legislatif adalah faktor yang menurut pengalaman informan secara langsung memperluas kemampuan kader untuk menghasilkan dampak nyata di masyarakat. Informan menyebut angka yang cukup impresif: sekitar Rp 300 miliar dari anggaran pusat untuk pembangunan PDAM saja, yang dimediasi oleh anggota DPR RI dari Golkar. [Pernanda et.al \(2025\)](#) memberikan konteks teknis dari mekanisme ini dalam konteks Kota Padang, mengkonfirmasi bahwa Pokir memang berperan besar dalam memperluas kapasitas bertindak kader legislatif.

Ketiga, narasi informan dan temuan literatur mengindikasikan bahwa internalisasi doktrin partai dapat berfungsi sebagai kompas normatif yang mengarahkan perilaku kader.

Habibah et al. (2025) menemukan bahwa di antara kader Golkar yang mengikuti pendidikan politik terstruktur, internalisasi doktrin ini lebih kuat dan berkorelasi dengan kinerja elektoral yang lebih baik. Model kaderisasi berbasis nilai bukan hanya pelatihan teknis adalah prasyarat lahirnya kader dengan orientasi pelayanan publik yang tulus (Solihah et al., 2022).

Keempat, Dalam konteks yang dijelaskan informan, tekanan normatif dari elite partai tampak berfungsi sebagai mekanisme kontrol perilaku yang lebih efektif dari sanksi koersif. Ketika ketua partai menekankan bahwa kader harus 'menjaga marwah partai,' ia tidak hanya berbicara tentang citra ia menetapkan standar perilaku yang diinternalisasi kader sebagai nilai personal. Nugraha (2026) menemukan mekanisme serupa: kepemimpinan transformasional berbasis nilai di parpol Riau menghasilkan loyalitas kader yang lebih bertahan lama daripada pendekatan berbasis insentif material.

Kelima, komposisi demografis pengurus yang didominasi kader muda dalam penelitian ini tampak berkaitan dengan dinamika organisasi yang lebih adaptif. Kurniawan et al. (2025) mengkonfirmasi temuan ini dalam konteks AMPG Lampung: organisasi sayap Golkar yang didominasi kader muda mampu mengembangkan program yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan konstituen yang beragam.

Keenam, perubahan cara pandang terhadap politik itu sendiri merupakan faktor transformasi yang tidak bisa diabaikan. Siagan Dan Permatasari (2022) mencatat bahwa insecurisme politik rakyat menciptakan tekanan bagi kader untuk membuktikan komitmen mereka melalui hasil konkret sebuah dinamika yang mendorong kader untuk semakin berorientasi pada dampak nyata daripada sekadar retorika kampanye.

Table 3. Kategorisasi Faktor Transformasi Perilaku Politik Kader Golkar Kota Padang

Faktor	Jenis	Wujud Empiris	Teori Relevan	Dukungan Literature Review	Dampak pada Perilaku	Catatan Kritis
Akses Sumber Daya Kolektif	Struktural	Anggaran Pokir, jaringan DPR RI/DPRD Provinsi/Kota	Katz & Mair (1995)	John (2025); Pernanda et al. (2025) : Pokir terbukti memperluas kapasitas kader legislatif secara konkret	Ekspansi kapasitas bertindak secara signifikan	Risiko klientelisme jika distribusi manfaat tidak merata
Legitimasi Jabatan Formal	Institusional	SK Sekretaris DPD; pengakuan Ketua partai	Weber (2013)	Nugraha (2026) : legitimasi formal SK partai menjadi fondasi otoritas kepemimpinan kader	Otoritas dan kepercayaan diri kader meningkat	Legitimasi bersifat relasional, tidak otomatis dari jabatan

Tekanan Normatif Elite	Organisasional	Arahan ketua: "berbuat baik, jaga marwah partai"	Michels (1911)	Habibah et al. (2025): doktrin partai yang diinternalisasi lebih berhasil daripada sanksi koersif	Perilaku karitatif dan orientasi publik menguat	Moral suasion tanpa kontrol prosedural rentan manipulasi
Perubahan Posisi Struktural	Individual	Dari ASN ke kader; dari Waketum Bappilu ke Sekretaris	Budiatri et al. (2018)	Martini (2010) : perpindahan dari birokrasi ke ranah politik mengubah orientasi aktor secara fundamental	Redefinisi peran dan tanggung jawab	Perubahan identitas tidak selalu linier dan mulus
Ideologi dan Doktrin Partai	Kultural	"Dari Rakyat untuk Rakyat"; kode etik anti-kepentingan pribadi	Almond & Verba (1963)	Habibah et al. (2025); Solihah et al. (2022) : internalisasi ideologi partai berkorelasi dengan kualitas kader	Internalisasi nilai publik ke dalam pengambilan keputusan	Ideologi bisa menjadi selubung kepentingan kalau tidak ada akuntabilitas
Komposisi Kader Muda	Demografis	70% pengurus adalah anak muda; multi-latar belakang profesional	Duverger (1954)	Kurniawan et al. (2022) : dominasi kader muda AMPG menghasilkan organisasi yang lebih adaptif	Energi organisasi dan inovasi program meningkat	Kader muda perlu bimbingan agar energi terarahkan produktif

Sumber: Analisis penulis berdasarkan data wawancara, narrative literature review, dan kerangka teori, 2026

Relasi Kepentingan Partai dan Publik: Antara Konvergensi dan Ketegangan

Salah satu pertanyaan paling mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi antara kepentingan partai dan kepentingan publik dipahami dan diwujudkan oleh kader. Jawaban informan cukup tegas: 'Sebenarnya partai adalah perwakilan dari masyarakat; organisasi yang diatur undang-undang untuk mewakili masyarakat dalam pemenuhan harapan mereka.' Dalam pandangannya, kepentingan partai dan kepentingan publik pada dasarnya konvergen, bukan bertentangan.

Argumen konvergensi ini memiliki dasar empiris yang cukup kuat dalam narasi informan: program bedah rumah yang sudah berjalan, seragam gratis untuk siswa dari keluarga P3KE di 5 SMA, dan rencana perluasan program seragam ke seluruh SMA/SMK Negeri di Kota Padang untuk tahun 2026. anggota DPRD Kota Padang yang mengelola Pokir untuk program-program serupa mengalami kenaikan suara signifikan di Pemilu 2024, mengindikasikan bahwa konvergensi kepentingan partai-publik bisa bersifat resiprokal dan menguntungkan kedua pihak ([Pernanda et al., 2025](#)).

Namun, analisis kritis mengharuskan kita untuk melihat di balik konvergensi ini. [Elyta et al. \(2022\)](#) mengingatkan bahwa tanpa mekanisme akuntabilitas internal yang kuat, orientasi publik yang tampak tulus dapat bergeser menjadi instrumen kepentingan personal. [Syawawi \(2021\)](#) dan Amri [Wibowo et al. \(2024\)](#) menyarankan bahwa pembaharuan struktural baik dalam pendanaan partai maupun dalam regulasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa konvergensi kepentingan partai-publik tidak hanya bersifat situasional dan dependen pada kemauan elite.

Ketegangan yang lebih dalam muncul dalam pernyataan: 'Harapan setiap orang di partai tentu ingin menang. Dengan memegang kekuasaan, kita bisa berbuat lebih banyak.' Di sini, kemenangan elektoral secara eksplisit diletakkan sebagai prasyarat untuk pelayanan publik. Ini adalah logika cartel party yang diidentifikasi [Katz dan Mair \(1995\)](#): akses terhadap kekuasaan dipandang sebagai sumber legitimasi partai, dan kekuasaan itu dipertahankan antara lain melalui distribusi manfaat kepada masyarakat. Siklus ini bisa produktif ketika menghasilkan program nyata yang dibutuhkan masyarakat, namun berpotensi menjadi klientelisme jangka panjang ([Koho, 2021](#); [Yusri & Mahuli, 2023](#)).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengandung keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara transparan. Penggunaan satu informan kunci (key informant) sebagai sumber data primer adalah batasan terbesar. Meskipun profil informan memberikan perspektif yang unik dan kaya, satu orang tidak dapat merepresentasikan seluruh dinamika internal organisasi partai yang memiliki ratusan kader dengan pengalaman dan posisi yang beragam.

Pertama, ada risiko bias naratif: informan cenderung menyajikan versi terbaik dari pengalamannya. persepsi aktor politik tentang perannya sendiri sering kali terseleksi secara kognitif untuk mempertahankan citra positif ([Siagian & Permatasari, 2022](#)). Kedua, keterbatasan pada satu informan berarti penelitian ini tidak dapat mengeksplorasi perbedaan pengalaman antar-kader, apalagi menguji hipotesis tentang dinamika oligarki internal yang disinggung dalam pembahasan.

Ketiga, fakta bahwa informan baru menjabat sebagai Sekretaris selama beberapa hari pada saat wawancara dilakukan berarti pengalamannya dalam posisi baru belum terakumulasi. Temuan tentang kepemimpinan sebagai Sekretaris dengan demikian lebih bersifat proyektif daripada reflektif.

Penelitian lanjutan perlu memperluas basis informan dengan memasukkan perspektif dari anggota DPRD aktif, kader perempuan, kader muda dengan latar belakang berbeda, serta masyarakat penerima manfaat program partai untuk memverifikasi klaim akuntabilitas dari sisi penerima, bukan hanya dari sisi pemberi. Pendekatan komparatif dengan partai lain di Kota Padang, sebagaimana disarankan oleh narrative literature review, juga akan memperkuat generalisasi temuan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi perilaku politik kader Partai Golkar Kota Padang merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi antara

perubahan posisi struktural, akses terhadap sumber daya politik, internalisasi nilai partai, serta dinamika kepemimpinan dan pengambilan keputusan di dalam organisasi partai. Perpindahan dari birokrasi ke politik praktis tidak hanya mengubah kapasitas bertindak kader, tetapi juga membentuk orientasi baru dalam memandang kekuasaan, pelayanan publik, dan relasi dengan masyarakat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pola kepemimpinan yang berkembang cenderung bersifat transformasional-normatif, sementara mekanisme pengambilan keputusan berlangsung melalui proses deliberatif dan kompromi kolektif yang mencerminkan model inkrementalisme politik. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat keterkaitan antara kajian oligarki, kaderisasi partai, dan transformasi perilaku individu kader dalam konteks politik lokal Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program partai, khususnya yang berkaitan dengan distribusi sumber daya melalui Pokir, agar orientasi pelayanan publik tidak bergeser menjadi praktik klientelistik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah informan, melibatkan perspektif masyarakat penerima manfaat, serta melakukan studi komparatif antarpartai politik guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi perilaku kader dalam demokrasi lokal Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhianugrah, M. A., & Djumadin, Z. (2023). Dinamika oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis pengaruh elit politik. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.37950/neorespublica.v5i1.178>
- Alfri, J. R. (2025). Pokok Pemikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Akomodasi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 12(2), 103–114. <https://doi.org/10.37634/wacana.v12i2.23397>
- Arianto, B. (2021). Menakar politik kekerabatan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.37630/jipp.v7i1.441>
- Asnan, R. (2024). Analysis of Elite Contestation and Political Base of the GOLKAR Party during the 2014-2016 Joko Widodo Administration. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*. <https://doi.org/10.32996/jhss.2024.6.5.11>
- Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Amalia, L. S., & Hanafi, R. I. (2018). *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications. <https://www.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book232677>
- Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 65–81. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81>
- Duverger, M. (1954). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*.

Methuen.

- Elyta, E., Hertanto, H., & Maryanah, T. (2022). Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1394–1406. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7247>
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.241>
- Gustomy, R. (2020). Pandemi ke infodemi: Polarisasi politik dalam wacana Covid-19 pengguna Twitter. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 190–205. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8781>
- Hasibuan, S., & Ma'riyah, C. (2023). Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan Dalam Sekolah Partai Bagi Calon Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 20–46. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.82>
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party. *Party Politics*, 1(1), 5–28. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Koho, R. I. (2021). Oligarki dalam demokrasi Indonesia. *Lensa: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 15(1), 60–75.
- Kurniawan, I., Sulaksono, T. P., Mentari, A., Marsela, M., & Safitri, A. N. (2025). Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Pembinaan Generasi Muda: Studi Kasus AMPG Provinsi Lampung. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 18–26.
- Martini, R. (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia. *POLITIKA Jurnal Ilmu Politik MIP*, 1(1), 67–74.
- Michels, R. (1911). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. Free Press.
- Neuman, W. L. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.
- Nge, H. J. (2018). Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 59–84. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.42>
- Nugraha, D. (2026). Analisis Strategi Kepemimpinan Politik Dalam Membangun Loyalitas Dan Kapasitas Kader: Studi Kepemimpinan Transfomasional Pada Partai Politik Di Provinsi Riau. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13(5), 12–25.
- Nur Habibah, S. Z., Tsabitah Aldjabri, R. H., Ayu, N. R., Susilo, G. P., & Hanifan, H. Z. (2025). Perbandingan Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019 dan 2024. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 6(1), 42–60. <https://doi.org/10.33822/jpds.v6i1.11988>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book232962>
- Pernanda, F. A., Zetra, A., & Anggraini, D. (2025). Analisis Pengelolaan Anggaran Pokok-pokok Pikiran (POKIR) Anggota DPRD Kota Padang Osman Ayub Tahun 2020-2024. *Jurnal Kajian Islam Dan Politik*, 1(2), 24–31. <https://doi.org/10.65980/journalkips.v1i2.68>

- Siagian, A. M., & Permatasari, Y. (2022). Insecurisme Politik Rakyat Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. *POPULIKA*, 10(1), 10–23. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i1.380>
- Solihah, R., Kartini, D. S., & Herdiansah, A. G. (2022). Sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik di Indonesia masa reformasi. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 403–413. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36985>
- Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2021). Kemunduran demokrasi tata kelola SDA: Penguatan oligarki dan pelemahan partisipasi civil society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173–189.
- Syawawi, R. (2021). Memutus oligarki dan klientelisme dalam sistem politik Indonesia melalui pembaharuan pengaturan pendanaan partai politik oleh negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 139–152. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.742>
- Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Saintika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3).
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>
- Yusri, Y., & Mahuli, J. I. (2023). Dampak negara dikendalikan partai politik dan oligarki. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 78–84. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.452>